

DINAMIKA KURIKULUM PENDIDIKAN DI INDONESIA PADA TAHUN 1945-1965

THE DYNAMICS OF EDUCATION CURRICULUMS IN INDONESIA IN 1945-1965

Oleh: Sania Palupi dan Dr. Dyah Kumalasari, M.Pd, UNY

sania.palupi@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui: (1) pendidikan Indonesia pada masa awal kemerdekaan; (2) dinamika kurikulum pendidikan di Indonesia pada tahun 1945-1959; dan (3) dinamika kurikulum pendidikan di Indonesia pada tahun 1959-1965. Hasil penelitian ini adalah: (1) pendidikan Indonesia pada masa awal kemerdekaan didasarkan pada kebudayaan nasional. Namun, dalam penyelenggaraannya mengalami banyak hambatan akibat revolusi fisik pada tahun 1945 sampai 1950; (2) kurikulum yang digunakan di Indonesia pada tahun 1945-1965 adalah Rencana Pelajaran 1947 bagi sekolah dasar. Kurikulum sekolah menengah atas sampai tahun 1950 masih menggunakan kurikulum AMS. Sementara, kurikulum untuk sekolah menengah pertama, merupakan lanjutan dari MULO. Pada tahun 1952, munculnya Rencana Pelajaran Terurai 1952 sebagai pengembangan dari Rencana Pelajaran 1947; (3) kurikulum pendidikan Indonesia pada tahun 1955 sampai 1965 mengalami beberapa perubahan yaitu, Kurikulum Gaya Baru untuk SMA dan SMP serta Rencana Pendidikan Tahun 1964. Pada masa ini, *Civics* dimasukkan dalam susunan mata pelajaran yang merupakan awal dari pendidikan ideologi dalam kurikulum.

Kata Kunci: *Dinamika, kurikulum.*

ABSTRACT

This study aimed to investigate: (1) education in Indonesian in the early years of independence; (2) the dynamics of the education curriculums in Indonesia in 1945-1959; and (3) the dynamics of the education curriculums in Indonesia in 1959-1965. The results of this study were as follows. (1) Education in Indonesia in the early years of independence was based on Indonesian culture. However, the implementation of education in the early years of independence experienced many obstacles due to the physical revolution in 1945-1950. (2). The 1947 lesson plan for the elementary school was the first curriculum used in education in Indonesia after the independence. Up to 1950, the senior high school still used the AMS curriculum. Meanwhile, concerning the junior high school curriculum, some of its contents were a continuation of MULO. In 1952, the 1952 detailed lesson plan emerged as the development of the 1947 lesson plan. (3) Education curriculums in Indonesia in 1959 to 1965 again experienced changes, that was The 1961 New Style Curriculum for the Senior High School, the 1962 New Style Curriculum for the Junior High School, and the 1964 Education Plan. At that time, *Civics* was included in the subject matter arrangement in the New Style Curriculum which was the beginning of the existence of ideological education in the curriculum.

Keywords: *Dynamics, Education Curriculum*

PENDAHULUAN

Pendidikan secara sederhana dapat diartikan sebagai usaha manusia untuk membina kepribadiannya agar sesuai dengan nilai dan kebudayaan yang berlaku dalam masyarakat.¹ Melalui proses pendidikan, suatu bangsa berusaha untuk mencapai kemajuan-kemajuan dalam berbagai bidang kehidupan, baik dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, ilmu pengetahuan, dan perkembangan teknologi.

Sejarah pendidikan di Indonesia telah dimulai sejak masa kerajaan. Bahkan telah berlangsung sejak masa pra-aksara, namun masih bersifat sederhana. Kedatangan bangsa barat kemudian membawa berbagai perubahan dalam sejarah pendidikan Indonesia. Bangsa Belanda berusaha menyebarkan agama Protestan, setelah berakhirnya kekuasaan Portugis. Pada masa pemerintah Belanda mengambil alih kedudukan VOC². Tujuan pendidikan bukan lagi memupuk rasa takut terhadap Tuhan. Melainkan ditujukan pada kemampuan intelektual, nilai-nilai rasional

dan sosial serta usaha untuk mencapai tujuan sekuler lainnya. Peristiwa ini menandai dimulainya pendidikan modern di Indonesia sejak akhir abad ke-18.

Memasuki masa pendudukan Jepang yang dimulai sejak tahun 1942 sampai 1945 pendidikan militer lebih diutamakan. Jepang juga menjadikan pendidikan sebagai alat propaganda dan penanaman nilai-nilai dan kebudayaan Jepang.³ Perubahan pendidikan yang terjadi sejak masa kedatangan bangsa Barat hingga kemerdekaan juga ikut mempengaruhi isi kurikulum yang digunakan. Dalam sejarah pendidikan Indonesia, kurikulum pendidikan masa pemerintahan kolonial dan masa pendudukan Jepang memiliki isi dan orientasi yang berbeda. Begitu juga setelah Indonesia merdeka. Hal tersebut menandakan bahwa kurikulum merupakan salah satu komponen penting dalam pendidikan.⁴

Salah satu peran penting kurikulum adalah membentuk kepribadian bangsa agar sesuai dengan yang dicita-citakan. Tidak hanya itu, kurikulum juga dapat dijadikan

¹ Hasbullah, *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm.1.

² Pada tahun 1602, para pedagang Belanda yang saling bersaing akhirnya bergabung membentuk Perserikatan Maskapai Hindia Timur, VOC (*Vereenig-de Oost-Indische Compagnie*). Lihat M. C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern*, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2008), hlm.51.

³ Soegarda Poerbakawatja, *Pendidikan dalam Alam Indonesia Merdeka*, (Jakarta: Gunung Agung, 1970), hlm.33.

⁴ Leo Agung, *Sejarah Kurikulum Sekolah Menengah di Indonesia: Sejak Kemerdekaan Hingga Reformasi*, (Yogyakarta: Ombak, 2015), hlm.4.

sebagai alat membentuk kepribadian anak sebagaimana yang diharapkan. Sehingga, banyak para ahli kurikulum yang berpendapat bahwa kurikulum merupakan jantung pendidikan dan menjadi penentu tujuan bangsa di masa depan.⁵

Berbagai perubahan dalam pendidikan Indonesia pada masa awal kemerdekaan hingga berakhirnya Orde Lama tidak dapat dilepaskan dari pengaruh kondisi politik bangsa Indonesia. Seiring dengan perkembangan zaman, kurikulum pendidikan di Indonesia juga terus mengalami perubahan, baik dari segi muatan maupun orientasinya. Pada masa ini pendidikan difokuskan sebagai upaya membangun karakter bangsa. Nuansa pendidikan banyak diwarnai oleh semangat patriotisme dan menanamkan rasa cinta pada tanah air. Bahkan, Romo Mangun memuji pendidikan pada masa ini karena mampu mengikis model pendidikan yang feodalistis.⁶

Kurikulum pada tahun 1945 sampai 1965 memiliki peran penting dalam perkembangan kurikulum nasional di masa selanjutnya yang terus berlangsung hingga saat ini. Dapat dikatakan bahwa kurikulum pada periode ini merupakan dasar bagi

⁵ Moh. Yamin, *Manajemen Mutu Kurikulum Pendidikan*, (Yogyakarta: Diva Press, 2009), hlm.13.

⁶ Y. Dedy Pradipto, *Belajar Sejati VS Kurikulum Nasional*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm.223.

perkembangan kurikulum di Indonesia. Selain itu, kurikulum ini juga merupakan kurikulum pendidikan pertama setelah Indonesia merdeka dan disusun atas kehendak bangsa Indonesia sendiri. Untuk itu, perlu diketahui bagaimana dinamika kurikulum di Indonesia setelah kemerdekaan hingga berakhirnya Orde Lama. Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji “Dinamika Kurikulum Pendidikan di Indonesia Tahun 1945-1965”.

METODE PENELITIAN

Metode sejarah merupakan metode penelitian sejarah yang dilakukan secara ilmiah dengan menggunakan cara yang sistematis. Menurut Garraghan, metode penelitian sejarah adalah seperangkat aturan dan prinsip sistematis untuk mengumpulkan sumber-sumber sejarah secara efektif, menilainya secara kritis dan mengajukan sintesis dari hasil yang dicapai dalam bentuk tertulis.⁷ Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian menurut Kuntowijoyo dengan langkah sebagai berikut.

1. Pemilihan Topik

Pada tahap ini peneliti memilih topik Dinamika Kurikulum Pendidikan di Indonesia pada tahun 1945-1965.

⁷ Abd. Rahman Hamid & Muhammad Saleh Madjid, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Ombak, 2014), hlm.53.

Alasan pemilihan topik ini karena kurikulum pada masa kemerdekaan hingga berakhirnya Orde Lama memiliki peran penting dalam perkembangan kurikulum pendidikan di Indonesia selanjutnya. Dimana, kurikulum pertama Indonesia dikenal dengan nama Rencana Pelajaran (*Leerplan*) yang merupakan warisan pendidikan pada masa kolonial.

2. Pengumpulan Sumber (*Heuristic*)

Heuristik merupakan tahap pengumpulan sumber. Pada tahap ini peneliti mengumpulkan berbagai sumber yang berkaitan dengan topik yang dikaji dengan menggunakan studi (telaah) kepustakaan.⁸ Adapun sumber sejarah berdasarkan sifatnya, dapat dibagi menjadi sumber primer dan sumber sekunder. Berikut merupakan sumber yang digunakan dalam penelitian ini.

Sumber sejarah disebut primer bila disampaikan oleh saksi mata yang menyaksikan atau terlibat langsung dalam suatu peristiwa sejarah.⁹ Menurut sejarawan yang termasuk dalam sumber primer dapat berupa arsip, tulisan atau dokumen se-zaman

yang berkaitan langsung dengan peristiwa sejarah. Adapun sumber primer yang digunakan sebagai berikut.

Arsip No.87. Front Nasional. "Pelaksanaan Pendidikan Nasional".

Arsip No. 648. Ruslan Abdul Gani 1950-1976. "Naskah Mata Pelajaran Manipol-Usdek, Indoktrinasi Dasar dan Soal-soal".

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah, yaitu Undang-Undang pertama tentang pendidikan.

Soegarda Poerbakawaja¹⁰. (1970). *Pendidikan dalam Alam Indonesia Merdeka*. Jakarta: Gunung Agung.

Surat Kabar Minggoe Merdeka. Edisi 7 Juni tahun 1946. Samoed Sastrowardjo: "Sekolah Tempat Poesat Mendidik Persatoean".

_____. Edisi 17 Agustus tahun 1946. Bachtiar: "Pendidikan dan Pembangoenan Sepintas Laloé".

⁸ Helius Sjamsuddin, *Metodologi Sejarah*, (Yogyakarta: Ombak, 2012), hlm.68.

⁹ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013), hlm.75.

¹⁰ Soegarda Poebakawaja merupakan salah satu tokoh yang memiliki peran penting dalam pendidikan Indonesia, beliau pernah diangkat sebagai Sekretaris Panitia Penyelidik Pengajaran yang diketuai oleh KHD. Beliau juga pernah menjabat sebagai Inspektur Jenderal Kementerian PP dan K pada masa Muhammad yamin. Diakses dari Ahmad Abdul Haq, http://ahmad.web.id/sites/apa_dan_siapa_tempo/profil/S/20030626-49-S_2.html. Diakses pada tanggal 28 Agustus 2018.

_____. Edisi 24 Agustus tahun 1946.
Oetami Soeriadarma: *Mendidik Soeatoe Bangsa*. Hlm.9.

Suara Merdeka. Edisi 6 Juni tahun 1964. Penjelasan Supardo SH: *"Pantja Wardhana Mutlak Bersumber Pantjasila"*. Hlm.2.

Sumber sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa buku, sebagai berikut.

Ary H. Gunawan. (1986). *Kebijakan-Kebijakan Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.

I. Djumhur & H. Danasuparta. (1976). *Sejarah Pendidikan*. Bandung: CV Ilmu.

Ki Hadjar Dewantara. (1977). *Karya Ki Hadjar Dewantara Bagian Pertama: Pendidikan*. Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa.

Wardiman Djojonegoro. (1996). *50 Tahun Perkembangan Pendidikan Indonesia*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan, Depdikbud.

Yasin Anwar. (1987). *Pembaharuan Kurikulum Sekolah Dasar Sejak Proklamasi Kemerdekaan*, Jakarta: Balai Pustaka.

3. Kritik Sumber (Verifikasi)

Kritik yang dilakukan dalam penelitian ini diantaranya, pada bahan yang dijadikan sebagai sumber primer. Peneliti melakukan kritik terhadap surat kabar dan arsip yang digunakan. Selain

memperhatikan tahun terbit, peneliti juga melihat isi dari tulisan agar sesuai dengan tema yang dikaji. Selain itu, peneliti juga mempertimbangkan posisi penulis sebagai pelaku atau saksi sejarah. Seperti salah satu sumber primer yang penulis gunakan karya Soegarda, meskipun buku yang ditulis diterbitkan pada tahun 1970, tetapi penulis buku yaitu Soegarda merupakan saksi sekaligus pelaku sejarah mengingat peran beliau dalam dunia pendidikan Indonesia.

4. Penafsiran (Interpretasi)

Tahap selanjutnya setelah melakukan kritik sumber adalah interpretasi atau penafsiran. Suatu pendapat dihubungkan dengan pendapat lainnya, sehingga terdapat kesesuaian penafsiran terkait dengan topik yang dikaji yaitu dinamika kurikulum pendidikan di Indonesia pada tahun 1945 sampai 1965. Pada tahap intepretasi ini, ilmu sejarah tidak berdiri sendiri. Melainkan diperlukan sejumlah konsep dan pendekatan teoritis dari ilmu-ilmu lain, sehingga konstruksi masa lalu lebih kritis dan analisis.¹¹

5. Penulisan Sejarah

Pada tahap ini, terdapat tiga bagian yaitu, pengantar yang

¹¹ Abd. Rahman Hamid & Muhammad Saleh Madjid, *op.cit.*, hlm.51.

meliputi permasalahan dan latar belakang, hasil penelitian berupa analisis serta fakta-fakta yang didapat dari berbagai sumber dan yang terakhir yaitu berupa kesimpulan. Berupa generalisasi dari bab-bab yang telah diuraikan sebelumnya. Sehingga, hasil karya historiografi adalah sejarah kritis dan utuh mengenai objek studinya. Aspek kronologi juga berperan penting dalam penulisan sejarah, agar dapat mengetahui perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam suatu peristiwa sejarah.

PEMBAHASAN

Pendidikan Indonesia pada masa awal kemerdekaan tidak terlepas dari pengaruh kondisi politik bangsa saat itu. Selama masa mempertahankan kemerdekaan antara tahun 1945-1950 bangsa Indonesia merasakan berbagai kesulitan baik dalam bidang sosial, ekonomi, politik, kebudayaan, termasuk dalam bidang pendidikan. Hal ini dikarenakan kondisi pemerintahan dan keamanan yang belum stabil. Akibat kondisi ini, pendidikan Indonesia pada masa awal kemerdekaan dalam kondisi memprihatinkan. Dapat dilihat dari sejumlah anak-anak usia sekolah hanya beberapa persen saja yang sempat merasakan pendidikan. Sehingga sisanya

lebih dari 90% penduduk Indonesia masih buta huruf.¹² Hal tersebut juga disebabkan sejak masa penjajahan, kesempatan anak-anak Indonesia untuk mengakses pendidikan sangat terbatas. Tidak hanya itu, kondisi fasilitas pendidikan banyak yang mengalami kerusakan.

Kondisi negara yang belum stabil tersebut tidak menghalangi pemerintah dan tokoh-tokoh bangsa untuk memperbaiki pendidikan Indonesia. Sejak proklamasi kemerdekaan, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya agar dapat memperbaiki sistem pendidikan Indonesia. Upaya tersebut dimulai dengan melakukan berbagai perubahan dalam bidang pendidikan. Perubahan yang terjadi dalam pendidikan Indonesia merupakan perubahan yang bersifat mendasar, yaitu perubahan yang menyangkut penyesuaian kebijakan pendidikan dengan dasar dan cita-cita dari suatu bangsa yang merdeka. Diantaranya meliputi perubahan dalam landasan idiil, tujuan pendidikan, sistem persekolahan, kesempatan belajar dan kurikulum

¹² Sugiyono, Aman, Dyah Kumalasari, dkk, *Peta Jalan Pendidikan Indonesia*, (Yogyakarta: TIM UNY, _____), diakses dari staffnew.uny.ac.id/upload/132304482/.../buku-peta-jalanpendidikanindonesia.pdf. Pada tanggal 1 Desember 2017, hlm.51.

pendidikan.¹³ Selain itu, dilaksanakan pula penambahan jumlah pengajar, pembangunan gedung sekolah dan lain sebagainya.

Kurikulum sebagai salah satu komponen pendidikan juga ikut diperbaharui. Kurikulum pertama yang digunakan dalam sejarah pendidikan Indonesia setelah merdeka dikenal dengan sebutan Rencana Pelajaran 1947 untuk Sekolah Rakyat. Kurikulum ini disusun berdasarkan pada tujuan pendidikan nasional Indonesia. Pendidikan nasional menurut Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan yang berdasarkan garis hidup bangsanya (kultur-nasional) dan ditujukan untuk keperluan perikehidupan yang dapat mengangkat derajat negeri dan rakyatnya, sehingga bersamaan kedudukan dan pantas bekerjasama dengan bangsa-bangsa lain untuk kemuliaan segenap manusia di seluruh dunia.¹⁴

Nuansa pendidikan pada masa ini banyak diwarnai oleh semangat

nasionalisme¹⁵ dan patriotisme¹⁶. Nasionalisme Indonesia adalah nasionalisme yang berpondasi Pancasila, yang menghendaki penghargaan, penghormatan, toleransi kepada bangsa atau suku bangsa lain.¹⁷ Meskipun pendidikan bercorak nasional, bukan berarti menolak sesuatu yang berasal dari Barat. Sebab untuk mencapai kemajuan, bangsa Indonesia juga harus memperoleh ilmu pengetahuan yang berasal dari belahan dunia lain.¹⁸

Bentuk rencana pelajaran tahun 1947 memuat dua hal pokok, yaitu daftar mata pelajaran dan jam pengajarannya serta Garis-Garis Besar Program Pengajaran.

¹⁵ Menurut KBBI, nasionalisme adalah paham (ajaran) untuk mencintai bangsa dan negara sendiri, atau dapat pula diartikan sebagai kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa yang secara potensial atau actual secara bersama-sama mencapai mempertahankan, dan mengabdikan identitas, integritas, kemakmuran, dan kekuatan bangsa itu. Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm.954.

¹⁶ Menurut KBBI Patriotisme adalah sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segala-segalanya untuk kejayaan dan kemakmuran tanah air, atau dapat juga diartikan sebagai semangat cinta tanah air. Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, *ibid.*, hlm.1031.

¹⁷ Dyah Kumalasari, *Pendidikan Sejarah dan Nasionalisme*, jurnal Cakrawala Pendidikan, Volume 1 tahun 2008, hlm.19.

¹⁸ Lihat lampiran 2, Drs. H.S.A. Bachtiar: *Pendidikan dan Pembangoenan Sepintas Laloe*, Minggoe Merdeka, 17 Agustus tahun 1946.

¹³ Wardiman Djojonegoro, *50 Tahun Perkembangan Pendidikan Indonesia*, (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan, Depdikbud, 1996)., hlm.72.

¹⁴ Dyah Kumalasari, *Konsep Pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam Pendidikan Taman Siswa (tinjauan humanis-religius)*, ISTORIA, Volume VIII Nomor 1 September 2010, hlm.52.

Selain itu, struktur programnya juga dibedakan menjadi tiga macam. Pertama, untuk sekolah yang mempergunakan pengantar bahasa Daerah (Jawa, Sunda, dan Madura) pada kelas-kelas yang lebih rendah. Kedua, untuk sekolah yang berbahasa pengantar Bahasa Indonesia mulai kelas 1. Ketiga, untuk sekolah yang diselenggarakan sore hari karena terpaksa oleh keadaan (terbatas sampai kelas IV, sedangkan kelas V dan VI harus diselenggarakan pagi hari).¹⁹

Didikan Budi Pekerti dan beberapa mata pelajaran lain, dijadikan sebagai upaya untuk memperkuat persatuan. Selain itu, mata pelajaran sejarah juga mendapat perhatian penting yang dijadikan sebagai salah satu sarana dalam menumbuhkan sikap nasionalisme. Hal ini dikarenakan materinya yang kaya akan muatan lokal seperti sejarah perjuangan bangsa dalam meraih kemerdekaan yang berbeda di setiap daerah.²⁰

Pada tahun 1952, muncul Rencana Pelajaran Terurai yang merupakan pengembangan dari RP 1947, dimana mata pelajarannya lebih diperinci dari sebelumnya.²¹ Jadi, Rencana Pelajaran ini merupakan penyempurnaan dari Rencana

Pelajaran tahun 1947 yang masih bersifat sederhana. Mata pelajaran yang diperinci pada rencana pelajaran ini, mencakup seperti bahasa Indonesia, bahasa daerah, berhitung, ilmu alam, ilmu hayat, ilmu bumi dan sejarah. Perincian dalam rencana pelajaran terurai 1952 tidak hanya dilakukan pada mata pelajaran saja tetapi juga pada program pengajarannya.

RP terurai 1952 juga diperuntukkan bagi Sekolah Menengah Atas (SMA). Sebelumnya, kurikulum Sekolah Menengah Atas (SMA) yang digunakan pada tahun 1945 sampai 1950 tidak jauh berbeda dengan kurikulum AMS (*Algemene Middelbare School*). Baru kemudian diperbaharui dengan munculnya RP terurai 1952 yang merupakan penjabaran arah dan tujuan pendidikan sekolah menengah dan tujuan kurikulum yang menyiapkan pelajar ke pendidikan lebih tinggi atau pendidikan tinggi serta mendidik tenaga-tenaga ahli dalam berbagai lapangan khusus sesuai dengan bakat masing-masing dan kebutuhan masyarakat.²² Tidak jauh berbeda dengan kurikulum SMA, kurikulum SMP pada tahun 1945-1962 isi kurikulumnya sebagian merupakan lanjutan dari MULO (*Meer Uitgebreid Lager Onderwijs*) semasa pemerintahan

¹⁹ Wardiman Djojonegoro, *op.cit.*, hlm.95.

²⁰ Dyah Kumalasari, *ibid.*, hlm.17.

²¹ Leo Agung, *op.cit.*, hlm.25.

²² *Ibid.*, hlm.26.

Belanda.²³ Pembagian kelasnya dibagi menjadi dua, yaitu: 1) bagian A: Bahasa dan Pengetahuan Sosial, dan 2) bagian B: Ilmu Pasti dan Pengetahuan Alam.²⁴

Pada periode 1959-1965 tujuan pendidikan Indonesia mengalami perubahan. Perubahan pendidikan yang terjadi pada periode ini banyak dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan politik masa itu. Pada tahun 1961, dikembangkan kurikulum Gaya Baru untuk SMA. Materi pengajaran dalam kurikulum ini juga mengalami perubahan, antara lain: 1) sesuai dengan haluan negara, pelajaran Kewarganegaraan mendapat tempat teratas, baik dalam hal jumlah jam pelajaran maupun penilaian dalam ujian, 2) memerhatikan perkembangan jiwa si anak didik oleh ahli jiwa, pada tiap sekolah terdapat tim tenaga khusus, 3) dihapuskannya jurusan A, B, dan C pada kelas I SMA, dan pada akhir kelas satu, anak-anak dapat diketahui bakatnya, 4) Mulai kelas II dilakukan diferensiasi, dan 5) melakukan pendidikan prakarya dan pendidikan kesenian (anak

didik belajar masak, menjahit, bertukang dan lain-lain).

Kurikulum Gaya Baru juga diperuntukkan bagi SMP pada tahun 1962. Kurikulum ini disesuaikan dengan Sistem Pendidikan Pancawardhana.²⁵ Bagian A dan B pada kelas III SMP kemudian dihapuskan. B pada kurikulum SMP 1962 dimaksudkan untuk menghilangkan kesenjangan dalam kemampuan siswa pada masing-masing bagian. Selain itu, terdapat penambahan dua mata pelajaran baru ke dalam Rencana Pelajaran SMP, yaitu Ilmu Administrasi dan Kesejahteraan Keluarga.²⁶ Sesuai dengan kebijakan Pancawardhana, maka dimasukkan jam krida dengan tujuan memberikan kesempatan yang luas bagi para siswa untuk menemukan bakat dan minat masing-masing.

Kurikulum pada jenjang Sekolah Dasar juga mengalami perubahan sejak diberlakukannya kebijakan Pancawardhana yang mengembangkan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral. Pada tahun 1964, Direktorat Pendidikan Dasar/Prasekolah Departemen PP dan K mengeluarkan suatu buku pedoman kurikulum baru. Dalam pembaharuan ini, nama Rencana Pelajaran sebagai terjemahan dari *leerplan* kemudian

²³ S. Hamid Hasan, *Perkembangan Kurikulum: Perkembangan Ideologis dan Teoritik Pedagogis (1950-2005)*, (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia), diakses dari http://www.ws.konferensinasional/s_hamid_hasan.pdf, pada tanggal 28 November 2017, hlm.11.

²⁴ Abdullah Idi, *Pengembangan Kurikulum Teori & Praktik*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm.10.

²⁵ Wardiman Wedyodiningrat, *op.cit.*, hlm.125.

²⁶ Marwati Djoened Poepongoro & Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), hlm.376.

diganti dengan nama Rencana Pendidikan yang dianggap lebih sesuai dengan fungsi sekolah Dasar.²⁷ Kurikulum tahun 1964 untuk SD dilaksanakan mulai tahun 1965 sampai tahun 1968. Mata pelajaran atau bidang studi dikelompokkan sesuai dengan Pancawardhana menjadi lima kelompok bidang studi, yaitu.

- a. Perkembangan moral.
- b. Perkembangan Integensi.
- c. Perkembangan emosional/artistik.
- d. Perkembangan keprigelan.
- e. Perkembangan jasmaniah.²⁸

Mata pelajaran *Civics* (Kewargaan Negara) pada masa ini mendapat perhatian penting. Mata pelajaran *Civics* diperuntukkan bagi semua jenjang pendidikan dengan jumlah 2 jam pelajaran untuk masing-masing jenjang.²⁹ Bahkan *Civics* dijadikan sebagai mata pelajaran utama. Hal ini merupakan perubahan yang paling menonjol dalam perubahan kurikulum di Indonesia.

²⁷ Yasin Anwar, *Pembaharuan Kurikulum Sekolah Dasar Sejak Proklamasi Kemerdekaan*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1987), hlm.77.

²⁸ Iskandar Wiryokusumo & Usman Mulyadi, *Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum*, (Jakarta: Bina Aksara, 1988), hlm.100-101.

²⁹ Adriono, Rumpaka Hadi, Imung Mulyanto, dkk, *Jejak Langkah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (1945-2011)*, (Jakarta: Kemendikbud, 2011), hlm.100.

KESIMPULAN

Pendidikan Indonesia pada masa awal kemerdekaan tidak lepas dari kondisi bangsa Indonesia pada masa itu. Kondisi politik yang belum stabil ikut mempengaruhi jalannya pendidikan di Indonesia. Meskipun kondisi negara belum stabil, pemerintah maupun tokoh pendidikan Indonesia tetap berupaya untuk memperbaharui sistem pendidikan di Indonesia, termasuk kurikulum yang akan digunakan. Upaya yang paling menonjol dalam pendidikan Indonesia ialah, menghilangkan unsur-unsur pendidikan barat dan mengganti dengan pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia.

Dinamika kurikulum pendidikan di Indonesia pada tahun 1945-1959 tercatat mengalami beberapa perubahan. Mulai dari kurikulum pada tahun 1947 dikenal dengan nama rencana pelajaran (*leer plan*). RP 1947 ini merupakan kurikulum pertama yang masih sederhana. Kurikulum pada masa ini masih dipengaruhi oleh sistem pendidikan pada masa penjajahan. Sifatnya hanya meneruskan kurikulum yang pernah digunakan sebelumnya disertai penyesuaian dengan kondisi bangsa yang telah merdeka. Pemerintah berupaya untuk menghilangkan pengaruh-pengaruh dari pendidikan masa kolonial dengan menanamkan nilai-nilai nasionalisme dan semangat patriotisme.

Pada tahun 1952 kemudian diadakan pembaruan kurikulum sebelumnya yang disebut dengan Rencana Pelajaran Terurai 1952. Dimana rencana pelajaran ini lebih dirinci daripada sebelumnya. Sementara susunan mata pelajaran untuk SMA sampai tahun 1952 masih mengadopsi mata pelajaran AMS pada masa pemerintahan Belanda. Beberapa perubahan dilakukan sebagai penyesuaian dengan kondisi bangsa Indonesia yang telah merdeka. Pada masa ini, mata pelajaran di sekolah dijadikan sebagai sarana untuk mempererat rasa persatuan.

Dinamika kurikulum pendidikan di Indonesia pada tahun 1959-1965 lebih dipengaruhi oleh kondisi politik pada masa itu. Salah satu produk pendidikan yang paling menonjol pada masa ini adalah munculnya mata pelajaran *Civics* dalam susunan mata pelajaran sejak diberlakukannya kurikulum Gaya Baru tahun 1961 dan 1962. Sama seperti kurikulum sebelumnya, pelaksanaan kurikulum pada tahun 1959-1965 tidak berjalan lama. Padahal, sebenarnya pelaksanaan Kurikulum Gaya Baru tahun 1961, 1962 dan Rencana Pendidikan 1964 dapat berjalan dengan baik apabila didukung dengan fasilitas pendidikan yang baik pula.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abd. Rahman Hamid & Muhammad Saleh Madjid. (2014). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.

Abdullah Idi. (2014). *Pengembangan Kurikulum Teori & Praktik*. Jakarta: Rajawali Pers.

Adriono, Rumpaka Hadi, Imung Mulyanto, dkk. (2011). *Jejak Langkah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (1945-2011)*. Jakarta: Kemendikbud.

Dendy Sugono dkk. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Hasbullah. (2012). *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Pers.

Helius Sjamsuddin. (2012). *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.

Iskandar Wiryokusumo & Usman Mulyadi. (1988). *Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum*. Jakarta: Bina Aksara.

Kuntowijoyo. (2013). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.

Leo Agung. (2015). *Sejarah Kurikulum Sekolah Menengah di Indonesia: Sejak Kemerdekaan Hingga Reformasi*. Yogyakarta: Ombak.

Marwati Djoened Poesponegoro & Nugroho Notosusanto. (2010). *Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI*. Jakarta: Balai Pustaka.

Moh. Yamin. (2009). *Manajemen Mutu Kurikulum Pendidikan*. Yogyakarta: Diva Press.

Ricklefs, M. C. (2008). *Sejarah Indonesia Modern*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.

Soegarda Poerbakawatja. (1970). *Pendidikan dalam Alam Indonesia Merdeka*. Jakarta: Gunung Agung.

Wardiman Djojonegoro. (1996). *50 Tahun Perkembangan Pendidikan Indonesia*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan, Depdikbud.

Y. Dedy Pradipto. (2007). *Belajar Sejati VS Kurikulum Nasional*. Yogyakarta: Kanisius.

Yasin Anwar. (1987). *Pembaharuan Kurikulum Sekolah Dasar Sejak Proklamasi Kemerdekaan*, Jakarta: Balai Pustaka.

Surat Kabar
Minggu Merdeka. Edisi 17 Agustus tahun 1946. Bachtiar: "Pendidikan dan Pembangoenan Sepintas Laloe".

Jurnal
Dyah Kumalasari. (2008). Pendidikan Sejarah dan Nasionalisme. *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, Volume 1 Tahun, hlm. 17&19.

_____. Konsep Pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam Pendidikan Taman Siswa (tinjauan humanis-religius), *Jurnal ISTORIA*, Volume VIII Nomor 1 September, hlm.52.

Internet

Ahmad Abdul Haq. "Soegarda Poerbakawatja". Diakses dari http://ahmadweb.id/sites/apa_dan_si_apa_tempo/profil/S/20030626-49-S_2.html. Pada tanggal 28 Agustus 2018.

Apri Nuryanto, Dyah Kumalasari, Aman, dkk. (2017). *Peta Jalan Pendidikan Indonesia*. Yogyakarta: TIM UNY. staffnew.uny.ac.id/upload/132304482/.../buku-peta-jalan-pendidikan-indonesia.pdf, diakses pada tanggal 1 Desember 2017.

S. Hamid Hasan. _____. *Perkembangan Kurikulum: Perkembangan Ideologis dan Teoritik Pedagogis (1950-2005)*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia. Diakses dari https://www.geocities.ws/konferensinasionalsejarah/s_hamid_hasan.pdf, pada tanggal 28 November 2017.

Yogyakarta, September 2018

Pembimbing



Dr. Dyah Kumalasari, M.Pd
NIP. 19770618 200312 2 001

Menyetujui,
Reviewer



Dr. Aman, M.Pd
NIP.19741015 200312 1 001